

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012)**

Oleh

<sup>1</sup>Fitria Wulandari, <sup>2</sup>Asrizal, <sup>3</sup>Jolianis

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat

<sup>2</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

<sup>3</sup>Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat

**ABSTRACT**

**FitriaWulandari. 09090052. Effect of Economic Growth (GDP), Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) of the Government Expenditure In West Pasaman. Thesis. Economic Studies Program STKIP PGRI West Sumatra. Padang. 2013.**

Local Government to allocate funds in the budget Expenditure in the budget to increase the fixed assets. Expenditure allocation is based on local needs for facilities and infrastructure, both for the convenience of the government and publik facilities. This study aims to analyze : (1) Effect of Economic Growth on Local Spending, (2) Effect of local revenue (PAD) of the Shopping Area, (3) Effect of the General Allocation Fund (DAU) to Regional Shopping, (4) Economic Growth, Revenue, General Allocation Fund simultaneously on Government Expenditure In West Pasaman .

Types of research used in this study is a quantitative approach. Object of research conducted in the West Pasaman. The data used are time series data year budget period 2005-2012 obtained from BPKAD and BPS. The variables tested were the Economic Growth GDP seen from the data (X1), Revenue (X2), the General Allocation Fund ( X3 ) as the independent variable and Expenditure ( Y ) as the dependent variable. The data will be analyzed through the classical assumption. While used to test the hypothesis significance testing and multiple linear regression analysis.

This study found that : (1) Economic Growth significant effect on regional expenditure, (2) Revenue Expenditure berpengaruh significant, (3) General Allocation Funds significant effect on regional expenditure, and simultaneous hypothesis testing (4) Economic Growth, Revenue and General Allocation Funds significant effect on regional expenditure .

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah Dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Selain itu UU juga memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja daerah dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang dialokasikan dalam APBD.

Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 Tahun 1999 (dan UU No. 32 Tahun 2004) melibatkan dua pihak yaitu: pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum diterapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key dalam Yovita:2011:02). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik, dan dapat diatasi dengan pendekatan ilmu

ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Akan tetapi pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Belanja Daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan (Darise:2009:33).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah

peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satunya yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Daerah di daerahnya.

Adapun data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**DATA PDRB, PAD, DAU DAN BELANJA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**(DALAM JUTAAN RUPIAH)**

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>% Per tambahan</b>	<b>PDRB</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>PAD</b>	<b>% Per tambahan</b>	<b>DAU</b>	<b>% Per tambahan</b>
2005	97.810,79	0	1.988.703,86	0	3.572,67	0	109.228,00	0
2006	246.270,98	151,783	2.115.152,39	6,358	14.292,73	300,057	243.281,00	122,728
2007	386.855,94	57,085	2.250.818,83	6,414	19.599,54	37,129	271.069,00	11,422
2008	399.307,59	3,219	2.394.934,54	6,403	20.556,24	4,881	305.576,07	12,730
2009	453.251,24	13,509	2.544.771,31	6,256	23.220,62	12,961	323.123,28	5,742
2010	490.644,13	8,250	2.707.342,74	6,388	24.204,87	4,239	350.371,16	8,433
2011	557.397,96	13,605	2.881.110,75	6,418	28.646,70	18,351	437.992,67	25,008
2012	659.236,02	18,270	3.063.879,74	6,344	32.493,95	13,430	457.694,68	4,498

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah (BD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, adapun peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar sebesar 151,783% hal ini dapat diartikan bahwa pada awal pemekaran Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2005, Pemda Pasaman

Barat sangat banyak mengeluarkan dana untuk pemebangunan Daerahnya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari peningkatan BD, maka sangat seimbang dengan perkembangan PDRB di Kabupaten Pasaman Barat, karena semakin tinggi pengeluaran BD yang terjadi semakin tinggi juga PDRB yang ada. Dimana dari tabel di atas dapat dikatakan PDRB Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang bagus hingga mencapai tingkat pertambahan sebesar 6,418% sampai dengan tahun 2011.

Sedangkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak jauh berbeda dengan kondisi BD, dimana kondisi PAD juga mengalami peningkatan pertambahan dari tahun ke tahun, dimana tingkat persentase pertambahan PAD yang tertinggi yaitu sebesar 300,057% yang terjadi pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tingkat persentase PAD hanya mengalami sedikit pertambahan bahkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dengan perubahan PAD yang semakin kecil dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membiayai belanja akan mengalami penurunan bahkan tidak akan terdandi. Dengan kondisi seperti ini bahwa PAD belum dapat diandalkan untuk membiayai program dalam BD yang terus terjadi seiring tuntutan kebutuhan dan cakupan layanan publik yang harus semakin baik.

Dengan menurunnya kemampuan PAD dalam membiayai BD, maka dibutuhkan transfer dari pemerintah pusat yang disebut dengan DAU, dimana dalam data di atas dapat dilihat bahwa DAU mengalami peningkatan 122,728% pada tahun 2006. Dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 DAU terus mengalami peningkatan persentase sampai 25,008% pada tahun 2011. Jika dibandingkan dengan persentase BD pada tahun 2011, yaitu sampai mencapai perubahan pertambahan sebesar 13,605%. Dengan kondisi seperti ini dapat terlihat bahwa DAU ikut membiayai operasi dan belanja pembangunan daerah yang oleh Pemda dilaporkan diperhitungan APBD. Tujuan dari tranfers DAU ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasaman Barat terutama pengaruhnya terhadap

Belanja Daerah dan bermaksud untuk menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat”**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah. Menurut Suhanda (2007:43) keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### **Belanja Daerah (BD)**

Menurut Halim (2007:100) belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau

depleksi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

### **Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dimana sejak tahun 2005 BPS telah melakukan perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB dari tahun 1993 menjadi tahun 2000 sebagai tahun dasar perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

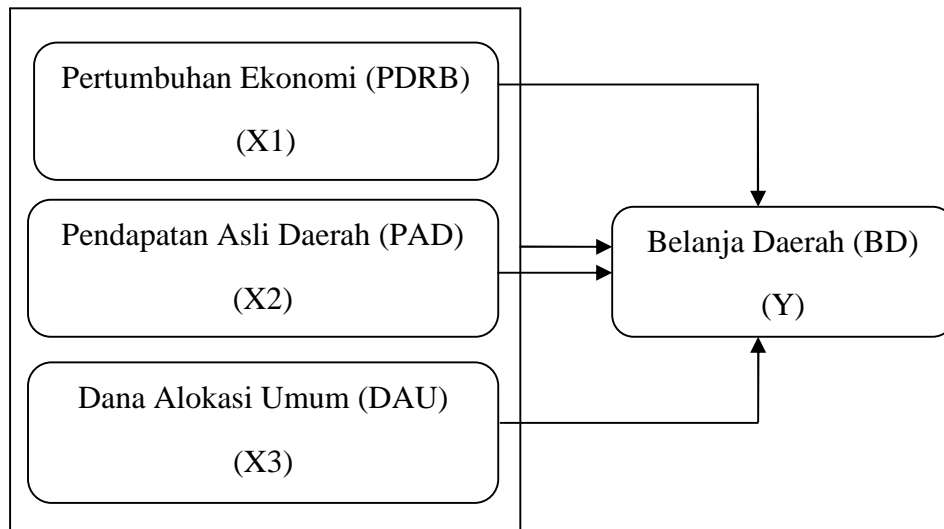
### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Darise (2009:38) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

## Kerangka Konseptual



## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan diambil adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
4. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD), maka penulis berusaha membuktikan permasalahan yang dihadapi dengan pemecahan secara pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Agustus 2013. Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan data *Time Series* (urutan waktu) yaitu data yang dikumpulkan dari tahun ke tahun (tahun 2005-2012) dimana data tersebut merupakan data skunder yang diperoleh dari lembaga atau Instansi Pemerintah yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BPS di Kabupaten Pasaman Barat.



## Teknik Analisa Data

1. Analisa Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Model Regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi, yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta

X1 = PDRB

X2 = PAD

X3 = DAU

b1, b2, b3 = Koefisien regresi X1, X2 dan X3

e = Kesalahan Pengganda (error)

## PEMBAHASAN

**Tabel 4.8**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

No	Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig.	Keterangan
1.	(Constant)	-225084,048	4,272	0,013	
2.	PDRB	0,163	4,671	0,010	Signifikan
3.	PAD	22,971	8,430	0,001	Signifikan
4.	DAU	-0,797	-3,076	0,037	Signifikan
F <sub>hitung</sub>		= 717,023			
F <sub>sig</sub>		= 0,000 <sup>a</sup>			
R <sub>Square</sub>		= 0,998			
Adjusted R Square		= 0,997			

Sumber : Hasil pengolahan data (2013)

Dilihat dari nilai t<sub>hitung</sub> untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 4,671 dan untuk membandingkannya dengan nilai t<sub>tabel</sub>, maka dapat dilihat melalui rumus df = n-k pada p-value = 0,05 sehingga diperoleh nilai t<sub>tabel</sub> sebesar 2,015. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena menunjukkan t<sub>hitung</sub> sebesar 4,671 > t<sub>tabel</sub> sebesar 2,015 dan angka signifikan 0,010. Oleh karena itu angka signifikan 0,010 < 0,05. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau

individu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin besar Belanja Daerah yang dikeluarkan terutama belanja modal, maka akan semakin bagus Pertumbuhan Ekonomi yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Askam Tuasikal (2008) dan Yulia Yustika Sari (2007), yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan penerimaan daerah.

Sedangkan dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 8,430 dan untuk membandingkannya dengan nilai  $t_{tabel}$ , maka dapat dilihat melalui rumus  $df = n - k$  pada  $p\text{-value} = 0,05$  sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,015. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar  $8,430 > t_{tabel}$  sebesar 2,015 dan angka signifikan 0,001. Oleh karena itu angka signifikan  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama pada belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Askam Tausikal (2008) dan Yulia Yustika Sari (2007), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sedangkan dilihat dari nilai signifikan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini dapat dilihat karena angka signifikan hanya 0,037 dan kecil dari 0,05 ( $0,037 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Akan tetapi jika dilihat dari nilai koefisien DAU, maka koefisien DAU bernilai negatif sebesar -3,076. Untuk membandingkannya dengan nilai  $t_{tabel}$ , maka dapat dilihat melalui rumus  $df = n - k$  pada  $p\text{-value} = 0,05$  sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,015. Oleh karena itu  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,076 < t_{tabel}$  sebesar 2,015. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU berbanding terbalik

terhadap Belanja Daerah, yang artinya Dana Alokasi Umum tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi Belanja Daerah di Pasaman Barat, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setiap Kabupaten yang memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah dan sosial politik daerah. Selain itu, sebagian pemerintah daerah juga mengharapkan dana bagi hasil, DAK dan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Berdasarkan hasil koefisien DAU yang bernilai negatif sebesar -3,076 dapat juga dikatakan bahwa semua DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak semuanya digunakan untuk Belanja Daerah, akan tetapi digunakan untuk hal-hal lain yang tujuan untuk membangun daerah, dengan ini dapat dikatakan bahwa dalam membiayai Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak ketergantungan sepenuhnya terhadap pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah walaupun tidak semuanya digunakan untuk Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh  $F_{hitung}$  untuk variabel PDRB, PAD, dan DAU adalah sebesar 717,023 dan untuk membandingkannya dengan nilai  $F_{tabel}$ , maka dapat dilihat melalui rumus  $dk = n-k-1$  pada  $p-value = 0,05$  dan  $df = k$  sehingga diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 6,590. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PDRB, PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 717,023 >  $F_{tabel}$  sebesar 6,590 dan angka signifikan 0,000. Oleh karena itu angka signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Oleh karena itu model regresi pada penelitian ini dapat dipakai untuk memprediksi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan koefisien determinasi variabel PDRB, PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,997. Artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat antara PDRB, PAD dan DAU terhadap

Belanja Daerah. Hal ini menandakan bahwa variabel independen (PDRB, PAD, DAU) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (BD) sebesar 99,7% dan sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini. Pengaruh yang sangat kuat dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pasaman Barat yang tercermin dalam APBD sangat ditentukan oleh besar kecilnya PDRB, PAD dan DAU. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pasaman Barat dalam melakukan alokasi anggaran publik yang diperuntukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait dengan Belanja Daerah sangat tergantung pada PDRB, PAD, dan DAU.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah tahun anggaran 2005-2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya yang terkait dengan Belanja Daerah, rata-rata Pemerintah Daerah lebih bergantung pada PDRB, PAD dan DAU.
2. Secara bersama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan  $F_{hitung} 717,023 > F_{tabel} 6,590$  atau dengan angka signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PDRB, PAD dan DAU mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan.

## Saran

Belanja Daerah diarahkan untuk lebih pada peningkatan proporsi belanja kepentingan publik seperti meningkatkan belanja modal. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program - program strategis daerah.

## KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Askam, Tuasikal. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*.

Bastian, Indra. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

----- (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Berutu, Reza Monandar. (2009). Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*. Medan.

Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

----- (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.

Dwi Kurniawan, Septiawan. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang*.

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Handayani. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Analisis Flypaper Effect di Kabupaten Cianjur). *Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia: Jakarta*.

Hariadi, Pramono, dkk. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kesit, Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi. Universitas Islam Indonesia*.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Noerdiawan, Deddi, dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Suratno Putro. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengelolaan anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Di Ponegoro: Semarang*.
- Riwu Kaho, Josef. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siregar, Syofian. (2010). *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima sari.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Robinson. (2007). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael.(2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Yovita, Farah Marta. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengelolaan anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi: Semarang*.
- Yulia, Yustika Sari. (2007). Pengaruh PDRB, PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*.
- Zuriah, Nurul. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.